

## BAB IV

# P E N U T U P

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013 yang disusun ini, merupakan wujud dukungan sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi semakin profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai umpan balik (*feed back*) bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 27 (dua puluh tujuh) sasaran, disimpulkan bahwa **12 sasaran (44,44%)** tercapai dengan predikat **Sangat Berhasil**, **3 sasaran (11,11%)** tercapai dengan predikat **Berhasil**, **6 sasaran (22,22%)** tercapai dengan predikat **Cukup Berhasil** dan **6 sasaran (22,22%)** dengan predikat **Kurang Berhasil**. Adapun Sasaran yang kurang berhasil adalah :

1. Sasaran Meningkatnya Daya Saing Lulusan setiap Jenjang Pendidikan;
2. Sasaran Tercapainya Standar Pelayanan Kesehatan secara Nasional;
3. Sasaran Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Program Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat;
4. Sasaran Tercapainya Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dan Pelayanan Pemerintahan;
6. Sasaran Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 117 indikator sasaran, disimpulkan bahwa 75 (tujuh puluh lima) indikator sasaran atau 64,10% dikategorikan **Sangat Berhasil**, 17 (tujuh belas) indikator sasaran atau 14,53% dikategorikan **Berhasil**, 16 (enam belas) indikator sasaran atau 13,67% mencapai kategori **Cukup Berhasil**, 9 (sembilan) indikator sasaran atau 7,69% mencapai kategori **Kurang Berhasil** dalam pencapaian indikator sasaran.

Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan. Ada beberapa Indikator sasaran yang berkategori cukup dan kurang sehingga perlu perhatian pada Tahun berikutnya. Adapun Indikator Sasaran yang berkategori Kurang yaitu :

1. *Pondok Pesantren yang melaksanakan Program Usaha Kesehatan Sekolah.* Kabupaten Mandailing Natal memiliki 22 Pondok Pesantren. Tahun Anggaran 2013 ditargetkan 18 Pondok Pesantren yang akan melaksanakan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), akan tetapi pada realisasinya hanya 10 Pondok Pesantren yang menyelenggarakan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dimaksud.
2. *Menurunnya Angka Kematian Bayi.* Dari Target 27,5/1000 kelahiran hidup Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal hanya mampu mencapai 9/1000 kelahiran hidup.
3. *Menurunnya Angka Kematian Balita.* Dari Target 33/1000 kelahiran hidup Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal hanya mampu mencapai 11/1000 kelahiran hidup.
4. *Persentase Pelaksanaan Desa Siaga Aktif.* Dari target 100% diharapkan seluruh desa di wilayah Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan program desa Siaga Aktif, namun hanya 37,31% yang menyelenggarakan program tersebut.
5. *Persentase Rumah Tangga yang melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).* Indikator ini tidak tercapai karena sejak Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum pernah menyelenggarakan Pendataan Rumah Tangga yang melakukan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih.

6. *Persentase Peraturan Daerah yang di sosialisasikan kepada masyarakat.* Hanya ada 20% Peraturan Daerah yang telah disosialisasikan kepada masyarakat dari jumlah Peraturan Daerah yang mengatur tentang masyarakat Mandailing Natal. Minimnya sosialisasi ini mengakibatkan masyarakat kurang mematuhi penegakan Peraturan Daerah.
7. *Frekuensi Pelaksanaan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.* Indikator ini tidak tercapai dengan baik, hanya tercapai 33,33% dari target yang ditetapkan. Ditargetkan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat sebanyak 3 kali namun pada realisasinya hanya dilaksanakan satu kali selama Tahun 2013.
8. *Persentase Penyelesaian Dokumen Penetapan Kinerja Tepat Waktu.* Indikator ini hanya tercapai 50% dari target yang ditetapkan 100%. Dokumen Penetapan Kinerja tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan yakni 3 (tiga) bulan setelah anggaran disahkan/ditetapkan. Faktor keterlambatan penyelesaian Dokumen Penetapan Kinerja antara lain adalah proses pengumpulan data dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
9. *Jumlah SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).* Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dari target 12 SKPD (18 urusan) hanya 10 (sepuluh) SKPD yang telah menyusun SPM dengan indikator dasar sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh Pemerintah

Kabupaten Mandailing Natal antara lain adalah :

1. Memberikan bantuan operasional kepada semua pondok pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal sehingga semua Pondok Pesantren mampu melaksanakan program-program yang mendukung kualitas Pondok Pesantren tersebut, salah satunya program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
2. Upaya menekan Angka Kematian Bayi melalui pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan pada keluarga miskin.
3. Upaya menurunkan Angka Kematian Balita adalah dengan pemberian tambahan gizi untuk Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan.
4. Upaya peningkatan Desa Siaga Aktif adalah dengan membina dan mengaktifkan desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawat daruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.
5. Upaya untuk meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah dengan pelaksanaan pendataan dan survey penduduk atau keluarga yang melaksanakan pola hidup sehat dan bersih dan terus mensosialisasikan pentingnya pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kepada masyarakat.
6. Sampainya informasi yang diamantakan Peraturan Daerah kepada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal perlu ditingkatkan dengan menambah frekuensi pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat baik dari Media Elektronik maupun Media Cetak.

7. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum perlu ditindaklanjuti dengan menambah frekuensi Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal pada 23 Kecamatan.
8. Upaya untuk menyelesaikan dokumen-dokumen penyusunan rencana kerja akan terus ditingkatkan agar dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
9. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait akan terus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga indikator dasar pada SPM dapat terlaksana dengan baik pada tiap-tiap SKPD terkait.

Untuk lebih sempurnanya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, maka ke depan akan dilakukan penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan yang akurat, cermat, dan terukur yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat. Kinerja pengawasan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana yang dibuat dapat berdaya guna dan berhasil guna. Mekanisme pengumpulan data kinerja yang telah ada akan ditingkatkan sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016 khususnya untuk Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dituangkan

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Jika terdapat indikator sasaran maupun pencapaian IPM yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi pada tahun mendatang.

Sebagai penutup dari LAKIP Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2013 dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis dan 117 (seratus tujuh belas) indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 secara umum dapat tercapai. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran dan indikator sasaran tersebut diatas merupakan acuan yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang.